

Strategi Media Relations Humas Polda Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis Pada Kasus Terorisme di Jawa Barat

Media Relations Strategy of West Java Regional Police Public Relations to Face a Crisis of Terrorism Case in West Java

¹Rina Tri Arumsari, ²Ani Yuningsih

^{1,2}*Prodi Ilmu Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rinatriarumsari@gmail.com, ²yuningsihani@yahoo.com

Abstract. Indonesia is a country that has a rich diversity of cultures, language, race, ethnic also religion which spread from Sabang to Merauke. However many challenges and distractions that threaten it. One of that distractions is the crisis of terrorism. West Java Regional Police as the organizer of public peaceful and neatness in the province, have a very important role to resolve the case of terrorism. Therefore, Public Relations of West Java Regional Police as the bridge between the institution and their public, have one special method to face a case of terrorism crisis through media relations strategy. The purpose of this research are to knowing how measure of West Java Regional Police Public Relations socialization to face a case of terrorism crisis in West Java, to knowing what media relations method that their used, and to knowing how the establishment media or media mapping as their partner. The method used in this research is qualitative with case study approach and data collection techniques which the writer used by observation, interview with informants and documentation. Based on result of this research, there is three conclusions that can be drawn are as follows:1)West Java Regional Police Public Relations implemented socializing prevention of terrorism by deradicalisation for high school students, communities and citizen organizations assisted by Resort Police with the purpose to educate, persuade and create collaboration with public.2)The media relations method chosen were made two teams to find and process a news and the other team to publish the news. Conducting press releases, press statements, special events, and press interviews. By information content used 5w+1h formulation, news will be published to print and electronic mass media in local, regional and national scope. The technique selected in spreading the news is an informative technique. 3)Media mapping procedure as West Java Regional Police Public Relations partner is by establish a working group of journalist that called "Pokja Wartawan Polda Jabar", with 58 members of print, electronic and online media from local, regional and national scope. The routine activities performed are press statements, press releases, press conferences, press luncheons and media visits. And the incidental activities are press interviews and special events.

Keywords : Public Relations, Media Relations Strategy, West Java Regional Police, Crisis Management, Terrorism

Abstrak. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan ragam budaya, bahasa, ras, suku juga agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, banyak tantangan dan gangguan yang mengancamnya, salah satunya adalah krisis terorisme. Polda Jawa Barat sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah provinsi, memiliki peran yang sangat penting dalam menuntaskan kasus terorisme. Untuk itu, humas Polda Jawa Barat sebagai jembatan antara instansi dan publiknya, memiliki metode khusus dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme, yakni melalui strategi media relations. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah sosialisasi humas Polda Jawa Barat dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, mengetahui metode komunikasi media relations yang digunakan, juga untuk mengetahui prosedur penetapan media sebagai partner/mitra. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut: 1)Humas Polda Jabar melakukan sosialisasi pencegahan aksi terorisme dengan deradikalisasi, yang ditujukan kepada murid-murid sekolah, komunitas-komunitas, dan ormas-ormas, yang dibantu oleh Polres-Polres untuk tujuan mengedukasi, mempersuasi dan menjalin kerja sama. 2)Metode komunikasi media relations yang dipilih adalah dengan membentuk tim pencari & pengolah berita dan tim penyebar berita. Melaksanakan kegiatan press release, press statement, special event, dan wawancara pers. Dengan konten informasi berformulasi 5w+1h berupa fakta, berita disampaikan ke media massa cetak dan elektronik, baik lokal, regional maupun nasional. Teknik yang dipilih dalam menyebarkan berita adalah teknik informatif. 3)Prosedur penetapan media sebagai mitra/partner adalah dengan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Wartawan Polda Jabar, yang terdiri dari

58 anggota dari jenis media cetak, elektronik, on-line dari lokal, regional dan nasional. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah siaran pers, keterangan pers, konferensi pers, jamuan pers dan kunjungan ke redaksi media. Kegiatan insidentalnya adalah wawancara pers dan special event.

Kata Kunci : Humas, Strategi Media Relations, Polda Jawa Barat, Manajemen Krisis, Terorisme

A. Pendahuluan

Sebutan negara kepulauan terbesar pertama di dunia bagi Indonesia patut kita banggakan. Dengan luas wilayah 1.910.931.32 km², menjadikan ibu pertiwi ini memiliki ragam budaya, bahasa, ras, suku juga agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berkat perjuangan seluruh warga Indonesia, tahun 1945 kita mampu berdiri sendiri di atas tanah air sebagai negara kedaulatan yang bebas dari penjajahan. Namun tidak hanya berhenti sampai sejak 17 Agustus 1945, berbagai ancaman keamanan dan pertahanan terus berdatangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Terorisme merupakan salah satu ancaman bagi Indonesia. Mengapa demikian? Terorisme merupakan tindak pidana kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. (UU No. 9 Tahun 2013). Maka dari itu, perlu adanya pencegahan juga penyelesaian atas krisis tersebut agar tidak berkelanjutan dan semakin parah yang dapat merusak tatanan kehidupan nasional maupun internasional.

Indonesia ditempatkan di peringkat ke-31 dari 162 negara di dunia pada Indeks Terorisme Global. Pada laporan bertajuk "Global Terrorism Index 2014" yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian (IEP), menempatkan Indonesia di posisi ke-3 di Asia Tenggara setelah Filipina dan Thailand. Aksi terorisme di Indonesia mulai marak sejak masa reformasi. Rangkaian teror bom diawali di Legian Bali pada Oktober. Kasus terorisme yang paling terbaru adalah ketika terjadi serangan bom di daerah Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis pagi, 14 Januari 2016. Belum lagi fenomena gerakan terorisme ISIS (Islamic State of Irak and Suriah) yang ramai diberitakan akhir-akhir ini.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. 2003. Sinar Grafika.)

Dalam kasus terorisme pun, humas di Polda Jawa Barat memiliki peranan untuk menjadi komunikator yang mem-back up instansinya, guna mencapai tujuan dan sasarannya sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara membina hubungan baik dengan publiknya juga menciptakan citra yang baik di mata masyarakat.

Dalam menghadapi krisis kasus terorisme, untuk menjaga reputasi Polda Jawa Barat sebagai aparat keamanan masyarakat, humas harus melakukan hubungan dengan media secara intensif. Untuk itu humas Polda Jawa Barat perlu menggunakan strategi-strategi khusus untuk membangun media relations tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi media relations humas Polda Jawa Barat dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Public Relations

Menurut Public Relations News:

“Public Relations is the management function which evaluates public attitudes identifies the policies and procedures of an individual or an organization with the public interest and executes a program of action to earn public understanding and acceptance.” (Yulianita, 2003: 25)

Dengan demikian dalam Public Relations News, Public Relations didefinisikan bahwa: Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menyatakan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan melaksanakan program kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publiknya.

Selain itu adapun definisi yang diungkapkan dari Cutlip, Center and Broom adalah seperti berikut:

“Public relations is the management function that identifies, establishes, and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the various publics on whom its or failure depends.”

Definisi di atas menyatakan bahwa “Public Relations adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publik, dimana hal tersebut dapat menentukan sukses atau gagalnya organisasi.

2. Tujuan Public Relations

Secara umum *Public Relations* memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik yang disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan publik yang bersangkutan dengan organisasinya, dan memperbaiki citra jika citra itu rusak/menurun.

3. Fungsi Public Relations

Secara universal terdapat dua fungsi *Public Relations* adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan kebijaksanaan manajemen pada publik
2. Menyampaikan opini publik pada manajemen

4. Lingkup Public Relations

Ada dua jenis sasaran publik *Public Relations* yaitu publik internal (publik yang berada di dalam organisasi) dan publik eksternal (publik yang berada di luar organisasi),

5. Press/Media Relations

Kegiatan *press relations* adalah kegiatan *Public Relations* yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur dan membina hubungan baik dengan pihak pers. Arti *press* itu sendiri secara harfiah adalah percetakan, tetapi pada perkembangannya istilah pers tidak hanya digunakan terbatas pada media massa berupa cetak saja melainkan termasuk ke dalamnya media televisi, radio dan sebagainya.

Menurut Frank Jefkins menyebutkan bahwa *Definition of press relations. The role of press relations is to achieve maximum publication or broadcasting of PR information in order to create knowledge and understanding.* (dalam Soemirat, Soleh, Elvinaro Ardianto. 2008: 122).

Batasan Jefkins mengenai peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau penyiaran secara maksimal tentang informasi PR yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya.

Ada beberapa bentuk kegiatan untuk membina hubungan baik dengan pihak pers tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Konferensi pers
 2. *Press Brefing*
 3. *Press Tour*
 4. *Press Release*
 5. *Special Event*
 6. *Press Luncheon*
 7. Wawancara Pers
6. *Media Relations* pada Saat Krisis

Setiap perusahaan/instansi tidak ada yang menginginkan datangnya krisis pada proses manajemennya, karena krisis tersebut dapat menghambat perkembangan perusahaan bahkan dapat menjadikan instansi/lembaga tersebut jatuh. Namun krisis tersebut bisa saja muncul kapanpun dan menimpa siapapun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah-Langkah Sosialisasi Humas Polda Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis pada Kasus Terorisme di Jawa Barat

Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh humas Polda Jawa Barat, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan terorisme dengan cara deradikalisasi kepada murid-murid sekolah, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, dan ormas-ormas. Kegiatan tersebut dibantu oleh pihak Polres kota maupun kabupaten seluruh Jawa Barat dengan bantuan alat pendukung media audio visual. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi, mempersuasi dan menjalin kerja sama dengan publik-publik terkait masalah terorisme. Publik yang mengikuti sosialisasi tersebut merasa senang dan terbuka wawasannya akan tindak pidana kasus terorisme. Hasil yang dirasakan oleh humas Polda Jabar pun adalah memuaskan, sebab dapat dilihat dari tidak adanya tindak pidana terorisme di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Metode Komunikasi *Media Relations* Humas Polda Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis pada Kasus Terorisme di Jawa Barat

Metode komunikasi *media relations* yang dilakukan oleh humas Polda Jawa Barat, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan membentuk tim yang terbagi menjadi dua yaitu tim PID yang bertugas untuk mencari dan mengolah berita. Kemudian tim Penmas yang bertugas untuk menyebarkan berita. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukannya adalah dengan pernyataan pers (*press statement*) melalui grup media sosial *Whatsapp*, wawancara pers, *press release*, dan melalui *special event* “Simulasi Penanganan Aksi Terorisme”. Adapun konten dan isi dari informasi yang disampaikan kepada media, yaitu berupa fakta dengan formulasi 5w+1h (*what, when, who, where, why, how*). Humas Polda Jabar menyampaikan informasi dan berita ke media massa jenis cetak (koran dan tabloid), elektronik (televisi dan radio), *on-line* baik lokal, regional maupun nasional. Adapun teknik yang dipilih dalam menyebarkan berita adalah dengan menggunakan teknik informatif.

Prosedur Pemetaan Media Sebagai *Partner/Mitra* Humas Polda Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis pada Kasus Terorisme di Jawa Barat

Prosedur penetapan media oleh humas Polda Jabar, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Polda Jabar yang terdiri atas 58 anggota dengan pengelompokan berdasarkan jenisnya yaitu media cetak, elektronik, *on-line*, sedangkan berdasarkan wilayah sirkulasinya adalah media massa lokal, regional maupun nasional. Kegiatan rutin yang dilakukan dengan pihak media adalah siaran pers (*press release*), keterangan pers (*press statement*) melalui grup media sosial *Whatsapp*, konferensi pers (*press conference*),

jamuan pers (*press luncheon*), dan kunjungan ke redaksi media (*media visit*). Sedangkan kegiatan insidental yang dilakukan dengan pihak media adalah wawancara pers dan *special event*. Selain itu humas Polda Jabar membuat ruangan wartawan sebagai bentuk kepeduliannya untuk menunjang kinerja para wartawan media massa.

D. Kesimpulan

1. Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh humas Polda Jawa Barat, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan dalam bentuk sosialisasi pencegahan terorisme deradikalisasi. Sasaran komunikasinya adalah pelajar, komunitas masyarakat, dan ormas. Komunikatornya adalah humas Polda Jabar sendiri dibantu dengan Polres kota/kabupaten seluruh Jawa Barat. Media komunikasinya adalah audio visual. Tujuan komunikasinya adalah edukasi, persuasif dan menjalin kerja sama.
2. Metode komunikasi *media relations* yang dilakukan oleh humas Polda Jawa Barat, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan membentuk dua tim yaitu tim pencari dan pengolah berita. Bentuk kegiatannya adalah pernyataan pers (*press statement*), wawancara pers, *press release*, dan melalui *special event*., Konten dan isi berupa fakta dengan formulasi 5w+1h. Jenis media massanya adalah media massa jenis cetak (koran dan tabloid), elektronik (televisi dan radio), *on-line* baik lokal, regional maupun nasional. Teknik komunikasinya adalah informatif.
3. Prosedur penetapan media oleh humas Polda Jabar, dalam menghadapi krisis pada kasus terorisme di Jawa Barat, adalah dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Polda Jabar yang terdiri atas 58 anggota gabungan media cetak, elektronik, *on-line*, baik itu media massa lokal, regional maupun nasional. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah siaran pers, keterangan pers, konferensi pers, jamuan pers, dan *media visit*. Sedangkan kegiatan insidentalnya adalah wawancara pers dan *special event*.

E. Saran

Saran Teoritis

Peneliti menyarankan untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan *media relations* humas Polda Jawa Barat dengan mengangkat fenomena dan kasus berbeda yang dapat dikaji yaitu :

1. kasus korupsi
2. kasus narkoba
3. kasus pembunuhan
4. kasus kejahatan seksual

Peneliti juga menyarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk melihat pengaruh dari strategi *media relations* humas Polda Jawa Barat terhadap reputasi Polda Jawa Barat.

Saran Praktis

1. Peneliti menyarankan untuk sosialisasi deradikalisasi pencegahan terorisme, humas Polda Jabar memperluas lagi khalayak sasarannya, tidak hanya kepada murid-murid tingkat sekolah juga bisa kepada mahasiswa di kampus-kampus seluruh wilayah Jawa Barat.
2. Selain dengan teknik informatif, peneliti menyarankan humas Polda Jabar dapat menerapkan teknik persuasif maupun instruktif kepada media massa terkait dengan pemberitaan mengenai kasus terorisme yang di anggap penting untuk dipublikasikan.

Daftar Pustaka

- Ruslan, Rosady. 1994. *Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemirat, Soleh, Elvinaro Ardianto. 2008. *Dasar-Dasar Public Relations*. Cetakan ke-6. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yulianita, Neni. 2003. *Dasar-Dasar Public Relations*. Cetakan ke-4. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U)
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. 2003. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_9.pdf. (diakses 9 Mei 2016, pkl 00.16)